

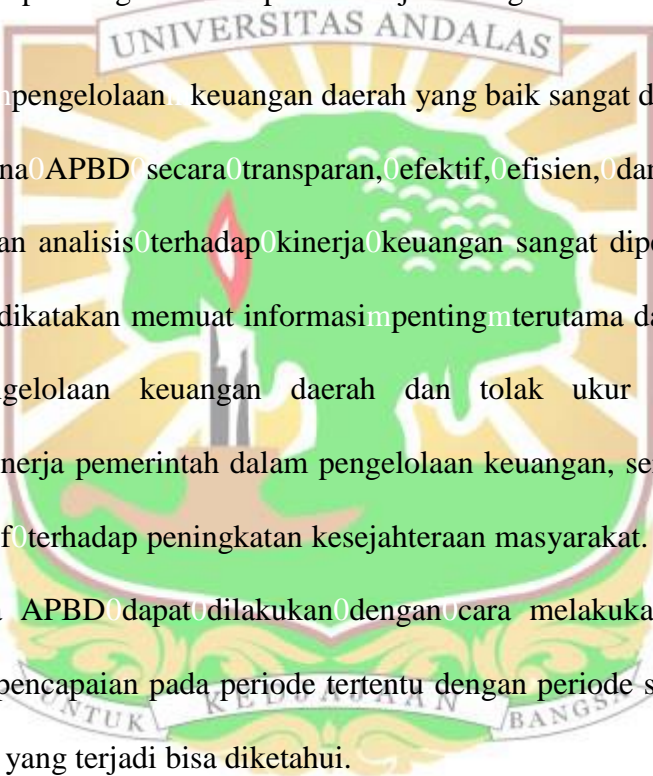
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator terwujudnya pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Perubahan cukup mendasar terhadap prosedur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimulai dari tanggal 1 Januari 2001. Munculnya reformasi total diseluruh kehidupan bangsa Indonesia akibat dari krisis ekonomi dan kepercayaan yang terjadi di Indonesia dan tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah merupakan penyebab dari reformasi total tersebut (Mardiasmo, 2002:3). Akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang termuat dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang sudah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di atas diharapkan dapat memperbaiki tata pemerintahan dan tata keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mana pemerintah pusat telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aspek pengelolaan keuangan juga masuk dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang disebut dengan otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Sumber-sumber keuangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sehingga tujuan otonomi itu tercapai dengan kemampuan kinerja keuangan daerah yang lebih baik.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top. Below the tree, there is a white banner with the motto "UNTUK KEMAJUAN BANGSA". The background of the shield is yellow with a sunburst pattern at the top.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat diperlukan dalam pengelolaan dana APBD secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini menyebabkan analisis terhadap kinerja keuangan sangat diperlukan. Kinerja keuangan bisa dikatakan memuat informasi penting terutama dalam pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap hasil pencapaian pada periode tertentu dengan periode sebelumnya agar kecenderungan yang terjadi bisa diketahui.

Halim (2007) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya

analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan agar terlihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Halim (2007) juga menyatakan bahwa cara mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan tersebut menjadi patokan dalam penilaian kinerja keuangan daerah dalam efektivitas dan efisiensi dalam memperoleh pendapatan daerah, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, memperlihatkan aktivitas belanja daerah, kontribusi pembentuk pendapatan daerah, serta pertumbuhan atau perkembangan pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Menurut Pramono (2014), perusahaan komersil telah mengimplementasikan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan, sedangkan pemakaian pada lembaga pemerintah kabupaten atau kota masih sangat terbatas karena belum adanya kesepakatan mengenai nama dan kaidah penilaiannya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari APBD.

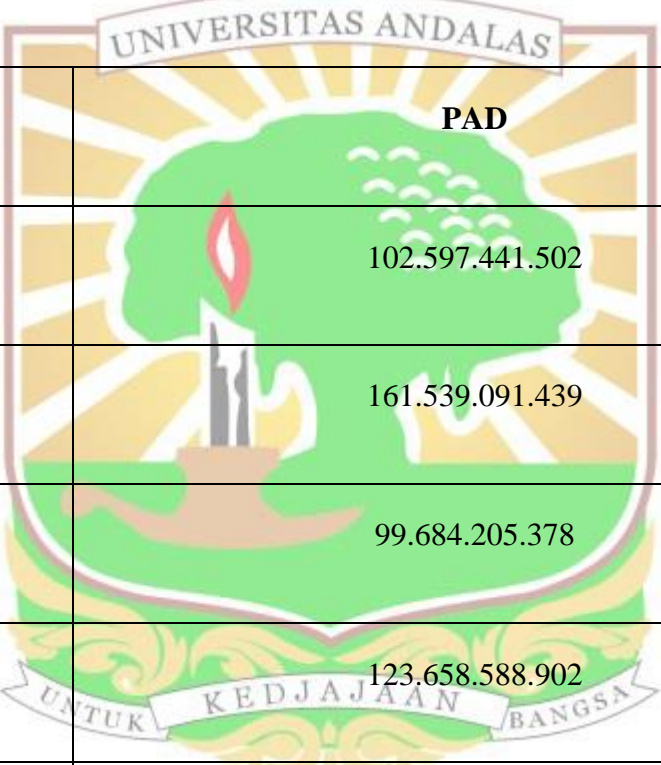
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. PAD bisa berupa pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang mempunyai hak otonomi daerah dengan harapan daerah dapat menjadi lebih mandiri serta mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang merata. Berikut adalah gambaran dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam tahun 2016-2020:

Tabel 1.1

Tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020



Tahun	PAD
2016	102.597.441.502
2017	161.539.091.439
2018	99.684.205.378
2019	123.658.588.902
2020	107.162.961.555

Sumber: Rangkang Data – BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Dari data di atas diperlihatkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Agam cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 dan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Agam terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp102.597.441.502,00. Tahun 2017 meningkat sebesar Rp58.941.649.937,00. Tahun 2018 menurun sebesar Rp61.854.886.061,00. Kemudian tahun 2019 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp23.974.383.524,00 dan tahun 2020 terjadi penurunan lagi sebesar Rp16.495.627.347,00. Kejadian ini disebabkan oleh pengaruh PAD yang berasal dari kelompok pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pembangunan daerah guna meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Agam diharapkan mampu memanfaatkan semaksimal mungkin potensi daerahnya melalui pemanfaatan sumber daya daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah. Salah satu penilaian tingkat kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui PAD. Besarnya nilai PAD yang dihasilkan akan menunjukkan sejauhmana kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan juga akan menunjukkan sejauhmana ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat apakah sudah berkurang atau belum. Hal tersebut tentunya memacu daerah untuk meningkatkan kemandiriannya daripada sebelumnya.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Agam sebagai objek penelitian karena Kabupaten Agam merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk terpadat. Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam setiap tahunnya

berikut dengan tingkat ketergantungan Kabupaten Agam terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marizka (2010), Boedi (2012), Oesi (2013, dan juga Rudiyanto (2015), rasio yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan desentralisasi fiskal untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian tersebut, ada beberapa rasio yang memperlihatkan nilai positif atau baik dan ada juga beberapa rasio yang memperlihatkan nilai negatif atau rendah. Rasio-rasio tersebut juga memperlihatkan masih sangat kurangnya kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dibuktikan dengan rasio kemandirian, ketergantungan, desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan menganalisis kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Agam dengan memakai empat rasio keuangan tersebut, yaitu rasio kemandirian, ketergantungan, desentralisasi fiskal, dan efektivitas.

Peneliti memutuskan untuk memperkecil ruang lingkup penelitian yang hanya terbatas pada analisis kinerja pendapatan saja. Peneliti akan menggunakan analisis varians pendapatan, analisis rasio pertumbuhan pendapatan, dan analisis rasio keuangan sebagai analisis rasio dimana analisis rasio keuangan ini dibagi lagi ke dalam beberapa jenis rasio yaitu rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas. Selain itu, peneliti menjadikan daerah penelitian, tahun penelitian dan rasio yang digunakan dalam

menganalisis kinerja keuangan sebagai pembeda penelitian dengan penelitian lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai kegiatan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pendapatan keuangan Kabupaten Agam periode 2016-2020 jika dilihat dari analisis rasio varians pendapatan?
2. Bagaimana kinerja pendapatan keuangan Kabupaten Agam periode 2016-2020 jika dilihat dari analisis rasio pertumbuhan pendapatan?
3. Bagaimana kinerja pendapatan keuangan Kabupaten Agam periode 2016-2020 jika dilihat analisis dari rasio keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan Kabupaten Agam periode 2016-2020 dengan rasio varians pendapatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan Kabupaten Agam periode 2016-2020 dengan rasio pertumbuhan pendapatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan Kabupaten Agam periode 2016-2020 dengan rasio keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Agam terutama dalam hal mengembangkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Agam dari segi pendapatan agar tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan dapat dilakukan.

- b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan keuangan daerahnya sendiri sehingga masyarakat umum menjadi tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerahnya terutama dalam hal pendapatan daerah.

c. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti tentang keuangan daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan S-1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian pada analisis kinerja keuangan pendapatan daerah pada Kabupaten Agam berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar gambaran tentang isi dari skripsi ini mudah dipahami, maka pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian ini secara umum.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian dan masalah-masalah yang menjadi topik penelitian yang dipakai untuk mendukung proses penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang otonomi daerah, keuangan daerah, sumber pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, konsep kinerja, APBD serta analisis rasio keuangan APBD.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan tentang desain penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis pengolahan data sekaligus pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Bab V : Penutup

Bab ini isinya mengenai kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh serta menguraikan keterbatasan dari penelitian yang dilaksanakan dan juga saran-saran yang akan dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

